



TRAGEDI GERAKAN MAHASISWA TRI SAKTI 1998: REPRESENTASI RUNTUHNYA TIRANI KEKUASAAN SOEHARTO

Didin Aryanto

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

didinnaftalia@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Pada hari Selasa, 12 Mei 1998, terjadi musibah penembakan terhadap mahasiswa Trisakti yang menyebabkan empat mahasiswa tewas di dekatnya. Episode ini menyambut kesusahan yang mendalam dari semua penduduk dan memicu kemarahan publik. Rakyat biasa, namun seluruh Indonesia merasakan kekecewaan yang mendalam terhadap kewibawaan Presiden Soeharto yang telah lama berkuasa. Pameran besar tidak terkendali di berbagai bagian negara. Banyak siswa lari ke Jakarta untuk meminta uang muka serupa. Bahkan, ada pengawasan DPR/MPR RI yang dikerjakan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Terlepas dari kenyataan bahwa Presiden Soeharto pada awalnya tidak akan turun dalam pertemuan di Istana Negara, ketegangan yang meluas dari berbagai kabupaten di Indonesia mendorongnya untuk akhirnya melaporkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998, delapan hari setelah Kemalangan Trisakti. Melihat kondisi tersebut, tujuan kajian ini adalah untuk membedah dahsyatnya perkembangan mahasiswa Tri Sakti pada tahun 1998, yang memiliki arti penting sebagai gambaran akhir dari sistem Soeharto. Metodologi kualitatif digunakan dalam ulasan ini, memanfaatkan teknik deskriptif untuk menggambarkan berbagai perspektif yang terungkap dari informasi yang dikumpulkan melalui berbagai laporan, termasuk buku dan artikel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa yang dapat diverifikasi termasuk perkembangan aktivis secara fundamental memengaruhi akhir sistem pada saat itu. Selanjutnya, artikel ini berperan dalam memperluas pemahaman sejarah ilmiah dan menambah sumber referensi dalam disiplin yang dapat diverifikasi, akibatnya menambah khazanah pengetahuan sejarah.

Kata kunci: Gerakan Mahasiswa, Tri Sakti, Orde Baru, Soeharto

ABSTRACT

On Tuesday, 12 May 1998, there was a shooting incident at Trisakti students which left four students dead nearby. This episode received the deep distress of all residents and provoked public outrage. Ordinary people, but all of Indonesia felt a deep disillusionment with the authority of President Suharto who had long been in power. Major fairs are out of control in different parts of the country. Many students ran to Jakarta to ask for a similar down payment. In fact, there is supervision of the DPR/MPR RI which is carried out by students from various tertiary institutions. Despite the fact that President Soeharto was initially not going to attend a meeting at the State Palace, the escalating tensions of various districts in Indonesia prompted him to finally report his resignation on May 21, 1998, eight days after the Trisakti Disaster. Seeing these conditions, the purpose of this study is to dissect the enormity of the development of the Tri Sakti students in 1998, which has an important meaning as the final picture of the Suharto system. A qualitative methodology is used in this review, utilizing descriptive techniques to describe the various perspectives revealed from the information collected through various

reports, including books and articles. The results of this research show that verifiable events including activist developments fundamentally influence the end of the system at that point. Furthermore, this article plays a role in broadening the understanding of scientific history and adding reference sources in verifiable disciplines, consequently adding to the treasury of historical knowledge.

Keywords: *Student Movement, Tri Sakti, New Order, Soeharto*

PENDAHULUAN

Latar belakang sejarah kemajuan aktivis mahasiswa di Indonesia terus menarik karena sangat erat kaitannya dengan sejarah perkembangan negara ini. Gerakan mahasiswa telah menjadi keanehan kritis dalam mengubah kancah politik Indonesia. Sejatinya, tugas *Understudy Development* selalu mempengaruhi situasi politik di tingkat publik. Salah satu contohnya adalah lengsernya Soekarno dari jabatan Presiden pada tahun 1966, dan digantikannya oleh Suharto pada tahun 1998, yang merupakan bukti nyata dari efek luar biasa perkembangan gerakan mahasiswa dalam perubahan politik di Indonesia (Nugraha, 2009: 01). Meskipun terus-menerus dipaksakan oleh para ahli pada setiap periodenya, gerakan mahasiswa sebenarnya muncul dengan sikap dasar dan tuntutan pembangunan dalam situasi politik publik.

Pembicaraan mengenai Gerakan Mahasiswa di Indonesia sarat dengan perubahan yang dinamis, karena mereka terus mengalami perkembangan dalam watak dan strukturnya dari waktu ke waktu. Sebagaimana ditunjukkan oleh Soewarsono (1999:1), sejarah awal Gerakan Mahasiswa di Indonesia dewasa ini dapat dipisahkan menjadi empat periode kritis, yaitu "angkatan 1908", "angkatan 1928", "angkatan 1945", dan angkatan 1966." Soewarsono juga menggarisbawahi bahwa keempat periode ini seperti "zaman" dalam sebuah "keturunan", yang mencatat capaian dan prestasi setiap "zaman baru" tertentu. Selain empat periode tersebut, ada satu lagi periode generasi yang terakhir dan berdampak signifikan, baik dalam perubahan kekuasaan politik maupun dalam proses pemungutan suara di Indonesia. Itu adalah "angkatan tahun 1998", di mana Gerakan Mahasiswa berlaku untuk menggulingkan Presiden Suharto, yang telah memerintah sejak lama.

Salah satu pemahaman utama terkait pemicu aksi massa Mei 1998 terkait dengan peristiwa penembakan empat mahasiswi Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998, yang terjadi sehari sebelum heboh dilontarkan. Meskipun sangat mungkin disarankan bahwa ini mungkin alasannya, sungguh, pemahaman tentang peristiwa ini tidak dapat dipermudah dengan cara seperti itu. Massa Mei 1998 tidak bisa dianggap sebagai peristiwa terpisah yang tetap soliter, melainkan merupakan konsekuensi dari kolaborasi berbagai peristiwa masa lalu, serentak, dan pasca. Hal ini disebabkan oleh ruwetnya unsur-unsur sosial, politik, dan keuangan yang saling terkait, yang di dalamnya terdapat perebutan kepentingan yang berbeda. Keadaan keuangan itu sendiri telah menurun. Beberapa pengaturan administrasi benar-benar menambah orang-orang yang bertahan lama. Peningkatan kritis dalam harga produk, terutama barang-barang penting, telah membuat keresahan di semua lapisan masyarakat di seluruh negeri (Zon, 2004).

Ada empat komponen pendorong untuk membangun pekerjaan mahasiswa di lingkaran politik. Pertama-tama, sebagai ciri masyarakat yang mendapatkan pelatihan berkualitas, mahasiswa memiliki pengetahuan yang luas tentang masyarakat. Kedua, mereka adalah kelompok yang cukup lama berada dalam iklim pendidikan, sehingga mengalami siklus sosial politik yang mendalam di kalangan usia muda. Ketiga, cara hidup yang unik dibingkai dalam iklim dasar yang memengaruhi mahasiswa. Akhirnya, sebagai kelompok yang akan naik ke

posisi teratas dalam konstruksi kekuatan, ekonomi, dan kedudukan publik, para siswa dengan sendirinya menjadi bagian dari kelas dunia di kalangan usia yang lebih muda (Sanit, 2007: 78-81).

Akhirnya, upaya agregat yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa tidak dapat dihentikan, menyebabkan bentrokan antara spesialis terbuka dan orang-orang yang menyebabkan pertunjukan massal di berbagai daerah, terutama di Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Aksi pemaparan ini berbicara tentang keinginan politik yang lebih luas di tingkat provinsi untuk membawa perubahan secara umum, khususnya dalam hal organisasi. Ketegangan dari semangat politik ini akhirnya menutup cara yang diambil oleh Suharto hingga akhirnya menyudahi masa kepemimpinannya (Sukoco, 2012).

METODE PENELITIAN

Teknik yang dipraktikkan dalam ulasan ini pasti mencoba melalui metodologi kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2016: 9), metode kualitatif adalah pendekatan penilaian yang muncul dari sudut pandang postpositivisme, digunakan untuk melihat kondisi biasa dari suatu barang di mana spesialis bertindak sebagai instrumen utama. Penelitian kualitatif-deskriptif ini bermaksud untuk menggambarkan, menguraikan, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang sedang diselidiki dengan sorotan yang lebih serius pada individu, kelompok, atau peristiwa yang menjadi titik fokus perhatian. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memfokuskan pada sumber-sumber data seperti buku, artikel, dan jurnal yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Tragedi Gerakan Mahasiswa Tri Sakti 1998

Gerakan mahasiswa tentu bukanlah hal yang ideal dan serba kuat. Karena kendala tersebut, mahasiswa memang harus menyesuaikan perkembangannya dengan tuntutan zaman. Analisis yang konsisten dan perhatian terhadap pilihan yang diambil merupakan hal mendasar. Seperti yang diungkapkan oleh orang bijak, perkembangan siswa adalah cerminan dari situasi yang unik. Ini berarti bahwa setiap periode memiliki atributnya sendiri dan perubahan dalam desain pembangunan yang juga berkembang setelah beberapa waktu. Jika aktivitas berat mengatur kemajuan pembangunan yang mereka perjuangkan, maka, pada saat itu, kepercayaan apa yang bisa dimiliki siswa pada suatu saat? (Adi Surya: Koran Media Indonesia. 2009: 8).

Namun, seperti biasa dalam perkembangan yang bersahabat, kontribusi mahasiswa dalam perkembangannya umumnya mencakup konstruksi hierarkis. Melalui asosiasi ini, mahasiswa melakukan berbagai kegiatan agregat, seperti pertemuan massal dan pertunjukan, untuk mencapai tujuan mereka. Secara keseluruhan, mereka melibatkan pameran jalan dan pendudukan struktur publik sebagai cara untuk mendorong permintaan mereka ke depan. Dalam tugasnya sebagai orang terpelajar, para mahasiswa melakukan berbagai pekerjaan, antara lain sebagai sarjana, perintis, dan pelaksana. Sebagai cendekiawan, mereka berusaha merencanakan dan mengusulkan pemikiran-pemikiran mengenai tajuk perbaikan daerah. Sebagai pionir, mereka dinamis dalam memacu dan mempersiapkan daerah setempat. Dukungan mereka dalam berbagai kegiatan sosial, sosial dan politik sejak lama merupakan tanda pelaksanaan yang pura-pura dilakukan oleh para mahasiswa (Sanit, 1999:208).

Menjelang akhir Februari 1998, kiprah mahasiswa yang dinamis di lingkungan lapangan semakin terlihat. Dorongan mendasar bagi asosiasi mahasiswa dan lingkungan akademik yang sebelumnya menyendiri terhadap otoritas publik adalah kekecewaan yang dirasakan oleh daerah karena penghapusan biaya kebutuhan pokok dan pertaruhan penghentian pendidikan dan masa depan yang dipertanyakan bagi sebagian besar mahasiswa. (Sumitro, Tanpa Tahun: 9).

Protes dilakukan para mahasiswa ketika Rapat Umum Permusyawaratan Perorangan (SU MPR) membawa beberapa permintaan. Pertama-tama, mereka menginginkan penurunan harga bahan pokok karena harga-harga tersebut telah meningkat sejak Juli 1997. Kedua, para mahasiswa juga mengajukan himbauan agar MPR tidak lagi mendukung pemerintahan Soeharto yang telah mencalonkan diri sebagai Presiden selama tujuh periode berturut-turut. Ketiga, mereka mendorong perubahan politik dan keuangan setelah MPR memilih Soeharto sebagai Presiden dan BJ. Habibie sebagai Wakil Presiden (Forrester, 2002:174). Tidak hanya melanjutkan sendirian, mempelajari bidang-bidang kekuatan utama yang diperoleh dari fragmen kelas terpelajar. Selain mahasiswa berperan dalam menyuarakan permintaan perubahan, namun mereka juga mendapat dukungan kritis dari rektor, anggota senior, dan guru di perguruan tinggi lainnya. Orang-orang yang baru saja harus mematuhi desain peraturan lapangan, sekarang saling menawarkan bantuan untuk pengembangan perubahan yang dilakukan oleh siswa. Amien Rais, sebagai Pengurus Muhammadiyah, juga memberikan bantuannya untuk pengembangan siswa meminta reformasi dilahirkan (Sahdan, 2004:246).

Pada Mei 1998, keadaan darurat memuncak di Indonesia. Di ranah politik, perkembangan melawan sistem Suharto terjadi di Jakarta dan faktor lingkungannya. Pada awalnya, gerakan ini hanya sebagai tontonan termasuk para mahasiswa dan massa pendukung lainnya. Namun, pertunjukan tersebut berubah menjadi kegaduhan massal termasuk demonstrasi pembakaran, penjarahan, dan pencurian di mal-mal dan toko-toko besar. Massa yang kemudian dikenal sebagai Peristiwa Mei 1998 terjadi di Kampus Trisakti, Grogol, Jakarta, pada 12 Mei 1998 (Soebroto, 2009: 1).

Sebelumnya, Perguruan Tinggi Trisakti tidak pernah berdiri sebagai perantara gerakan pelobi atau tempat mahasiswa menghadang para ahli. Berbeda dengan institusi negara seperti Sekolah Tinggi Indonesia (UI), Yayasan Inovasi Bandung (ITB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta yang selama ini dikenal dinamis dalam perkembangan mahasiswa. Bahkan, saat menghadapi kebijakan pemerintah pada pertengahan 1998, di tengah darurat ekonomi yang melanda Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya, cuaca di Trisakti tetap sejuk dan tidak terpengaruh. Di kalangan aktivis, mahasiswa Trisakti dipandang sebagai perkumpulan kelas atas yang lebih berpusat pada urusan privat, mungkin karena sebagian besar berasal dari yayasan kelas pekerja yang tidak terlalu terpengaruh oleh keadaan darurat (Zon, 2009: 39-40).

Insiden penembakan empat mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998, yang disusul oleh kegemparan besar di Jakarta dari 13 hingga 15 Mei, mencapai puncaknya pada 18 Mei 1998 ketika para mahasiswa berjaya untuk menguasai gedung DPR RI. Sekitar saat itu, ketika mayoritas di luar gedung hadir untuk menyuarakan aspirasinya, di dalam gedung DPR, inisiatif DPR dan kelompok politik lainnya mengadakan pertemuan dengan delegasi mahasiswa dari Silaturahmi Korespondensi Senat Mahasiswa (FKSMJ) Jabotabek untuk membahas apa yang terjadi (Soemardjan, 1999 : 175). Pilihan ini diambil dengan alasan bahwa yang terjadi di

Indonesia adalah pengaruh dan mengorbankan solidaritas publik. Menjelang sore, masyarakat umum tercengang mendengar penjelasan Harmoko, yang baru-baru ini dikenal sebagai sekutu setia Soeharto, mendorong Presiden berangkat demi solidaritas publik (Anderson, 1999:41). Pukul 15.20 WIB, Ketua DPR RI Harmoko bersama Wakil Ketua DPR seperti Ismail Hasan Metaareum (F-PP), Abdul Gafur (F-KP), Fatimah Achmad (F-PDI), dan Syarwan Hamid (F-ABRI), menyampaikan pandangan bahwa sebaiknya Presiden Soeharto menyerah.

Tepat tanggal 19 Mei 1998, pukul 09.00, di gedung MPR/DPR diadakan rapat atas prakarsa DPR dan para ketua rombongan. Silaturahmi ini rencananya akan membicarakan ajakan dari otoritas DPR kepada Presiden Soeharto untuk hengkang, yang disampaikan Ketua DPR Harmoko. Pembicaraan berlangsung selama lima jam, akhirnya para ketua kelompok menyampaikan bantuannya atas ajakan pengurus DPR kepada Presiden Soeharto agar beliau berangkat dengan santun dan sesuai aturan yang dilindungi (Luhulima, 2006:153). Lagi-lagi pada 20 Mei, Harmoko dan inisiatif MPR mendekati Soeharto untuk pergi. Bagaimanapun, Presiden Soeharto tidak akan meninggalkan jabatannya. Untuk itu, Harmoko memberikan usulan terakhir kepada Soeharto, yakni berangkat pada Jumat (22 Mei) atau menghadapi penyisihan luar biasa pada Senin (25 Mei). Akhirnya, setelah mendapat kepastian bahwa keluarga dan harta kekayaannya akan dilindungi, Soeharto bersedia hengkang.

Berakhirnya Tirani Kekuasaan Soeharto

Pada tahun 1966, periode lain yang disebut Orde Baru muncul yang menjadi tempat kemajuan dan harapan yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Masa kerawanan masa lalu yang sarat dengan kegoyahan, segera dikelola dengan berkembangnya Orde Baru yang dimotori Soeharto. Siklus pemeliharaan dimulai dengan menjaga situasi politik, diikuti oleh bidang keuangan dan perspektif pendukung lainnya. Kekuasaan yang maha kuasa dari Presiden Soeharto memunculkan berbagai tatanan pemerintahan yang berlaku dalam rangka membangun kekuatan publik. Cara-cara tersebut antara lain penguraian kelompok ideologis, perluasan keamanan, teknik keuangan, dan perubahan unsur-unsur pendirian negara sebagaimana diindikasikan oleh perspektif Suharto. Tugas utama otoritas publik ternyata sangat menonjol, sehingga dukungan suara dan tujuan individu tampaknya kurang diperhatikan selama periode ini (Hisyam, 2003:56).

Kepastian rakyat telah berkurang seiring dengan kemerosotan moneter yang telah diselesaikan oleh pemerintah Orde Baru selama sekitar 32 tahun. Ekspansi harga produk menjadi jelas, kontrak bisnis yang tak terhitung jumlahnya berakhir yang menyebabkan penurunan posisi terbuka, dan munculnya praktik penipuan, pengaturan dan nepotisme yang tersebar luas di Indonesia. Keadaan ini memicu perlawanan dari mahasiswa dan masyarakat Indonesia, yang mengecam Soeharto untuk meninggalkan posisinya sebagai presiden karena dianggap tidak mampu mengatasi berbagai isu yang mempengaruhi Indonesia (Luhulima, 2006:78).

Rezim Orde Baru menetapkan standar sebagai pemerintahan terlama dalam sejarah Indonesia, bertahan 32 tahun. Penting untuk kerangka kerja ini adalah perubahan dalam peristiwa dan kendali atas sumber daya publik melalui Program Kemajuan yang Ditarik (PELITA). Namun, sifat-sifatnya yang tidak demokratis dan kelemahannya dalam lingkaran politik menyebabkan ketidakstabilan politik dan moneter jangka panjang, terutama menjelang pengantian seribu tahun. Kekecewaan tiga partai besar dalam menjalankan kemampuan

pengawasan pemerintahannya disebabkan oleh perpecahan dalam konstruksi politik yang disampaikan oleh partai-partai kunci di ranah legislasi. Model politik semacam ini tidak mencerminkan atau memperhatikan tujuan pertama orang (Sukoco, 2012). Bidang-bidang politik menghambat kekuatan untuk menghadapi para ahli yang dibatasi oleh kekuatan militer, yang kemudian menggagalkan pengembangan rencana politik individu sebagai sumber kekuatan negara. Situasi yang sedang berlangsung ini diperparah dengan berakhirnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak dapat diantisipasi oleh para ahli publik dengan benar. Akhirnya, energi massa tidak dapat dihentikan, menyebabkan konflik antara pejabat pemerintah dan penduduk yang mendorong pameran di berbagai daerah, khususnya di Jakarta sebagai ibu kota. Pembicaraan dalam pertunjukan ini menggabungkan hiburan dari berbagai bidang untuk melakukan perbaikan yang signifikan, terutama di sudut manajerial. Ketegangan politik akhirnya menghentikan usaha yang dilancarkan oleh Suharto (Sukoco, 2012).

Menjelang akhir pemerintahannya, Presiden Soeharto mulai disisihkan oleh rekan-rekannya di pemerintahan. Pada 20 Mei, Harmoko dan Golkar yang sebelumnya setia kepada Soeharto berkompromi dengan Presiden agar dianggap bertanggung jawab dalam rapat luar biasa MPR. Dua Wakil Presiden Suharto sebelumnya, khususnya Letjen Sudharmono dan Jenderal Attempt Soetrisno, juga mulai membatasi pergaulan dengan bos-bos mereka sebelumnya. Suharto tidak lagi dapat meyakinkan siapa pun untuk bergabung dengan pemerintahannya atau dewan perubahan yang dia usulkan. Runtuhnya dasar-dasar kekuasaan Suharto ini membuat militer kesulitan menawarkan bantuan kepada Presiden (Anderson, 1999:68).

Bersamaan dengan itu, bantuan dunia untuk Suharto berkuasa telah mencair. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Madelaine Albright, sebelum pukul 12 siang, mengatakan sesuatu melalui CNN TV untuk mendesak Soeharto hengkang guna memuluskan interaksi menuju sistem demokrasi (Notosusanto, 2009:673). Langkah ini dilakukan oleh Menlu sebagai reaksi atas keluh kesah dan kekecewaan atas peristiwa Trisakti pada 12 Mei 1998. Kemudian Pendeta Proteksi juga menyebutkan bahwa segala bentuk partisipasi militer antara AS dan ABRI harus dihentikan tanpa penetapan. batas waktu tertentu (Zon, 2004 : 91).

Tekanan semakin meluas ketika atas dorongan Akbar Tanjung dan Ginandjar Kartasasmita, mengadakan rapat dan menyusun penjelasan agar tidak melanjutkan kewajibannya di divisi baru, sambil mendesak Presiden keluar (Notosusanto, 2009:672). Soeharto meminta Sekretaris Negara Saadillah Mursjid untuk mengatur cara sesuai konstitusi untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden. Suharto juga mengajarkan bahwa pengunduran dirinya harus dilakukan di Istana Merdeka. Masyarakat pada umumnya menjawab dengan semangat ketika mendengar kabar bahwa Soeharto sudah bisa keluar dari posisinya. Pada Kamis, 21 Mei 1998, Presiden Soeharto memberikan penegasan pengesahannya, disusul dengan penyerahan dan pengambilan kaul BJ. Habibie sebagai Kepala Negara Republik Indonesia di hadapan ahli negara. Setelah Suharto selesai membaca pernyataan dukungannya, fungsi janji dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memutuskan BJ. Habibie sebagai Kepala Negara Republik Indonesia.

SIMPULAN

Gerakan mahasiswa yang berlangsung sepanjang Mei 1998 mencapai puncaknya pada 12 Mei 1998 di halaman Universitas Trisakti. Keheningan yang dilakukan mahasiswa Universitas Trisakti kemudian berubah menjadi musibah yang berat. Episode ini menyebabkan empat mahasiswa Trisakti kehilangan nyawa karena ditembak polisi menggunakan peluru hidup. Sejak saat itu, perubahan cepat terjadi: gangguan terhadap kekuatan keamanan, konsumsi bangunan dan kendaraan, demonstrasi perampokan, dan tindakan kriminal lainnya memicu perubahan politik di kalangan kelas satu hingga pada akhirnya Suharto meninggalkan posisinya sebagai Pemimpin Republik. Indonesia. Peristiwa Trisakti sesungguhnya telah menjadi potret perubahan besar bagi Indonesia. Perkembangan Mahasiswa tahun 1998 merupakan perubahan sosial sebagai perkembangan perubahan yang dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat tanpa mengubah konstruksi fundamental yang ada. Keadaan sekitar saat itu membuat masyarakat menjadi lebih membumi dan seringkali bertindak dengan cara-cara yang merusak, sehingga menyebabkan peningkatan persentase kejahatan. Kekecewaan di kalangan masyarakat juga diperparah dengan tindakan yang tidak benar oleh otoritas publik, yang melakukan perlawanan dan pertunjukan karena meminta persetujuan Presiden Suharto. Menghadapi peristiwa di Indonesia, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto memutuskan untuk meninggalkan jabatannya, dan jabatannya digantikan oleh B.J. Habibie.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. dkk. (1998). Soeharto Lengser Perspektif Luar Negeri. *Terjemahan oleh Farid Wahdiyono*. Yogyakarta: LKiS.
- Forrester, G. (2002). *The Fall of Soeharto*. Australia: C. Hurst & Co Ltd ISBN.
- Hisyam, M. (2003). *Krisis masa kini dan orde baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jubaedah, S. (2019). Gerakan Mahasiswa (Kajian Tentang Peranan Mahasiswa Universitas Trisakti Pada Mei 1998 Dalam Proses Pergantian Kekuasaan Orde Baru). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2), 18-40.
- Luhulima. (2006). *Hari-Hari Terpanjang Mundurnya Presiden Soeharto dan Beberapa Peristiwa Terkait*. Jakarta.
- Nugraha, Y, A. (2009). Dinamika Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru: Kajian History Gerakan Dewan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung 1974-1982. *Skripsi Sarjana Pendidikan FPIPS Bandung*: Tidak diterbitkan.
- Poesponegoro, M. D. & Notosusanto. N. (2009). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sahdan, G. (2004). *Jalan Transisi Demokrasi*. Bantul: Pondok Edukasi.
- Sanit, A. (1999). *Pergolakan Melawan Kekuasaan Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*. Yogyakarta: INSIST press.
- Soebroto, Hendro. 2009. *Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando*. Jakarta: Kompas.
- Soemardjan, S. 1999. *Kisah Perjuangan Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Sugiyono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D. Bandung: *Alfabeta*.
- Sukoco, M. (2012). *Kajian Sistem Pemerintahan dan Politik*, April, (Online) diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/288670683_Kajian_Sistem_Politik_dan_Pemerintahan_di_Indonesia (05 Agustus 2023).
- Surya, Adi. “Menjadi Aktivis: Keharusan Bukan Pilihan” dalam *Media Indonesia*. Jakarta, 18 Oktober 2009.
- Usman, S. (TanpaTahun). *Mengapa Rakyat Indonesia Mendukung Presiden Suharto?*. Jakarta: C.V Djakarta.
- Zon, F. (2004). *Politik Huru-Hara Mei 1998*. Jakarta: Institute for Policy Studies.